

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kecamatan Asparaga mengenai implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Mengentaskan kemiskinan maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Proses implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Asparaga, yang meliputi : Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sos) , Musdes Sosialisasi, Sosialisasi dan Penggalan Gagasan, Musyawarah Khusus Perempuan, Musdes Perencanaan, MAD Prioritas Usulan , dan Penetapan Usulan, Musyawarah Desa Informasi Hasil, “Pertanggungjawaban”. Keseluruhan tahapan yang ada telah dilakukan dengan baik, tidak lain agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Asparaga berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi : faktor komunikasi dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan dalam menyampaikan pesan-pesan dan informasi pembangunan kepada masyarakat, khusus pesan-pesan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat miskin di kecamatan Asparaga, berikut faktor sumber daya juga terbukti sebagai faktor yang menentukan dalam pelaksanaan seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan, baik sumber daya manusia, sumber

daya sarana/prasarana, maupun sumber daya modal (finansial), selain itu partisipasi yang di tunjukan oleh masyarakat yang begitu besar, dalam hal pelaksanaan tahap awal sampai dengan tahap akhir pada kegiatan akhir dari PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu pula Faktor budaya masyarakat serta kondisi ekonomi dan lingkungan mempengaruhi proses implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Asparaga.

3. Dampak yang di berikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan sangatlah besar di rasakan oleh masyarakat waupun sedikitnya ada beberapa masalah yang di timbulkan, namun masalah itu tidaklah menutupi apa yang telah diberikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarkat seperti : bantuan modal atau dana bergulir bagi kelompok usaha perempuan ekonomi produktif masyarakat, program perbaikan rumah layak huni (Mahyani), hal ini dapat dilihat dengan kemandirrian masyarakat serta telah meningkatnya jumlah pendapatn masyarakat sehingga masyarakat tersebut tidak lagi masuk pada kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM).

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka demi perbaikan kedepan untuk pelaksanaan yang lebih baik penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari proses Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dari proses Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sos) , Musdes Sosialisasi, Sosialisasi dan Penggalian Gagasan, Musyawarah Khusus Perempuan, Musdes Perencanaan, MAD Prioritas Usulan , dan Penetapan

Usulan, Musyawarah Desa Informasi Hasil, “Pertanggungjawaban” kedepannya di harapkan dapat di laksanakan dengan lebih baik, dengan harapan agar program yang dihasilkan akan lebih bermutu dan berguna bagi masyarakat penerimanya.

2. Dalam pelaksanaanya ada bebera faktor yang menentukan berjalannya proses implementasi kebijakan diantaranya Faktor Komunikasi, Faktor Ekonomi, Faktor Partisipasi Masyarakat faktor SDM, Faktor Budaya Masyarakat. Kedepanya di harapkan beberapa faktor ini harus lebih diperhatikan, agar kedepanya proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Asparaga dapat berjalan dengan baik.
3. Melihat dampak yang signifikan mengenai implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Asparaga terhadap kemiskinan di Kecamatan Asparaga, maka dibutuhkan komitmen dan konsistensi serta keseriusan dari para pelaku dan pemerintah untuk keberlanjutan program PNPM Manriir Pedesaan ini agar lebih memberikan yang lebih banyak lagi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (1997) *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi keimplementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara Jakarta
- Dunn. William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press Washington, D.C.
- Effenddi Harianja, Marihot Tua. 2006. *Perilaku Organisasi : Memahami dan Mengelola Perilaku Dalam Organisasi*. Bandung : UNPAR Press
- Emzir.2010.*Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.*: Rajawali Pers. Jakarta
- Faudzi, Akhmad. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, John, 1992. *Empowerment: Politics of Allternation Development*, Massachusetts, Blackwell Publisher.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora
- Jones, Charles O.1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy*. Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto. Jakarta : PT RajaGrafmndo Persada.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk., 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Jogjakarta : YPAPI.
- Kuncoro, Mudradjat 1997. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi UGM: Yogyakarta.

- Kuswardoyo. 2006. *Sosiologi dan Antropologi Sebagai Ilmu tentang Perilaku Sosial dalam Masyarakat*. Surakarta: PT Pabelan.
- Mafruhah, Izza. 2009. *Multidimensi Kemiskinan*. LPP UNS : Surakarta.
- Milles & Huberman. (1992) *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, Jakarta: UI-Press.
- Nudgroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Polak, Paul. 2008. *Out of Poverty : What Works When Traditional Approaches Fail*. San Fransisco : Berrett-Koehler Publishers, Inc
- Rahmat (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif : Jakarta.
- Subarsono, Ab. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Alfabeta : Bandung.
- Supriatna, Tjahya. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta: Bandung
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor, Indonesia.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.

Widodo, Joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang :Bayu
Media Publishing.

Reitsma dan Kleinpenning (1994)[http://
profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/](http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/) (16-3-2012)